

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Analisis Rasio Keuangan Daerah

5.1.1. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif ataukah negatif (Mahmudi, 2016).

Rasio ini dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Pendapatan Th } t - \text{Pendapatan Th } (t - 1)}{\text{Pendapatan Th } (t - 1)} \times 100\%$$

Berikut adalah hasil perhitungan pertumbuhan keuangan daerah Kabupaten Timor Tengah Utara selama periode pengamatan 2014 – 2016.

a. Tahun anggaran 2014

$$\begin{aligned} &\text{Rasio Pertumbuhan} \\ &= \frac{688.661.451.560,22 - 608.393.454.079,61}{608.393.454.079,61} \times 100\% \\ &= 13,19\% \end{aligned}$$

b. Tahun anggaran 2015

$$\begin{aligned} &\text{Rasio Pertumbuhan} \\ &= \frac{783.648.995.959,80 - 688.661.451.560,22}{688.661.451.560,22} \times 100\% \\ &= 13,79\% \end{aligned}$$

c. Tahun anggaran 2016

Rasio Pertumbuhan

$$= \frac{918.557.400.998,73 - 918.557.400.998,73}{918.557.400.998,73} \times 100\%$$

$$= 17,22\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, berikut tabel yang memperlihatkan rekapitulasi pertumbuhan keuangan daerah Kabupaten Timor Tengah Utara selama periode pengamatan.

Tabel 5.1
Rasio Pertumbuhan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun
Anggaran 2014-2016

| Tahun Anggaran | Pendapatan Th t (Rp) | Pendapatan Th (t-1) (Rp) | Efektivitas Pendapatan (%) |
|----------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2014 | 688.661.451.560,22 | 608.393.454.079,61 | 13,19 |
| 2015 | 783.648.995.959,80 | 688.661.451.560,22 | 13,79 |
| 2016 | 918.557.400.998,73 | 783.648.995.959,80 | 17,22 |
| Rata-rata | | | 14,73 |

Sumber: BKAD Kabupaten TTU

Sementara perhitungan pertumbuhan keuangan daerah Kabupaten Belu selama periode pengamatan 2014 – 2016 adalah sebagai berikut:

a. Tahun anggaran 2014

Rasio Pertumbuhan

$$= \frac{586.677.127.234 - 841.202.878.244}{841.202.878.244} \times 100\%$$

$$= (30,26)\%$$

b. Tahun anggaran 2015

Rasio Pertumbuhan

$$= \frac{738.626.408.498 - 586.677.127.234}{586.677.127.234} \times 100\%$$
$$= 25,90 \%$$

c. Tahun anggaran 2016

Rasio Pertumbuhan

$$= \frac{816.442.053.570 - 738.626.408.498}{738.626.408.498} \times 100\%$$
$$= 10,54 \%$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, berikut tabel yang memperlihatkan rekapitulasi hasil perhitungan pertumbuhan keuangan daerah Kabupaten Belu selama periode pengamatan.

Tabel 5.2
Rasio Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2014-2016.

| Tahun Anggaran | Pendapatan Th t (Rp) | Pendapatan Th (t-1) (Rp) | Efektivitas Pendapatan (%) |
|----------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=2-3/3 |
| 2014 | 586.677.127.234 | 841.202.878.244 | (30,26) |
| 2015 | 738.626.408.498 | 586.677.127.234 | 25,90 |
| 2016 | 816.442.053.570 | 738.626.408.498 | 10,54 |
| Rata-rata | | | 2,06 |

Sumber: BPKAD Kabupaten Belu

Dari hasil perhitungan rasio pertumbuhan pada tabel-tabel diatas, dapat diketahui bahwa rasio pertumbuhan pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun anggaran 2014-2016 mengalami pertumbuhan positif (meningkat setiap tahunnya), dimulai dari tahun 2014 dengan nilai 13,19%, kemudian naik 0,6% menjadi 13,79% pada tahun 2015 dan 24,81% menjadi 3,43% pada tahun 2016. Hal ini disebabkan

karena adanya peningkatan dana perimbangan setiap tahun, yaitu sebesar 4,09% pada tahun 2015 dan 22,90% pada tahun 2016. Pendapatan asli daerahnya juga meningkat setiap tahun, yaitu sebesar 12,82% pada tahun 2015 dan 32,76% pada tahun 2016.

Berbeda halnya dengan pertumbuhan pendapatan Kabupaten Belu, dimana rasio pertumbuhan Kabupaten Belu berfluktuatif setiap tahunnya. Dimulai pada tahun 2014 sebesar -30,26%, dan pada tahun 2015 naik 4,36% menjadi 25,90%, kemudian pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 15,36% menjadi 10,54%.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan keuangan daerah Kabupaten Timor Tengah Utara lebih baik jika dibandingkan dengan Kabupaten Belu. Hal tersebut dapat dilihat dari rasio pertumbuhan keuangan daerah Kabupaten Timor Tengah Utara yang semakin meningkat setiap tahunnya, sedangkan rasio pertumbuhan keuangan daerah Kabupaten Belu berfluktuatif selama tiga tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2014-2016.

5.1.2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Mahmudi, 2016). Adapun rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli daerah}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman}} \times 100\%$$

Berikut adalah hasil perhitungan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Timor Tengah Utara selama periode pengamatan 2014 – 2016.

a. Tahun anggaran 2014

Rasio Kemandirian

$$= \frac{32.029.110.641,22}{592.017.131.798 + 14.135.485.008} \times 100\%$$

$$= 5,28\%$$

b. Tahun anggaran 2015

Rasio Kemandirian

$$= \frac{36.136.381.128}{616.246.049.242 + 6.961.408.704} \times 100\%$$

$$= 5,80\%$$

c. Tahun anggaran 2016

Rasio Kemandirian

$$= \frac{47.974.079.044}{757.385.944.356 + 22.402.503.823} \times 100\%$$

$$= 6,15\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, berikut tabel yang memperlihatkan rekapitulasi kemandirian keuangan daerah Kabupaten Timor Tengah Utara selama periode pengamatan.

Tabel 5.3
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun Anggaran 2014-2016.

| Tahun Anggaran | Pendapatan Asli Daerah (Rp) | Transfer Pusat dan Provinsi (Rp) | Pinjaman (Rp) | Efektivitas Kemandirian (%) | Kemampuan Keuangan |
|----------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6=2/3+4+5 | |
| 2014 | 32.029.110.641 | 592.017.131.798 | 14.135.485.008 | 5,28 | Rendah sekali |
| 2015 | 36.136.381.128 | 616.246.049.242 | 6.961.408.704 | 5,80 | Rendah sekali |
| 2016 | 47.974.079.044 | 757.385.944.356 | 22.402.503.823 | 6,15 | Rendah sekali |
| Rata-rata | | | | 5,74 | |

Sumber: BKAD Kabupaten TTU

Sementara perhitungan kemandirian keuangan daerah Kabupaten

Belu selama periode pengamatan 2014 – 2016 adalah sebagai berikut:

a. Tahun anggaran 2014

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{70.227.478.519}{515.647.707.537 + 16.201.288.179} \times 100\% \\ &= 13,20\% \end{aligned}$$

b. Tahun anggaran 2015

Rasio Kemandir

$$\begin{aligned} &= \frac{72.408.429.832}{664.947.339.943 + 15.975.409.248} \times 100\% \\ &= 10,63\% \end{aligned}$$

c. Tahun anggaran 2016

Rasio Kemandirian

$$\begin{aligned} &= \frac{74.823.080.565}{734.095.022.573 + 27.218.516.438} \times 100\% \\ &= 9,83\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, berikut tabel yang memperlihatkan rekapitulasi kemandirian keuangan daerah Kabupaten Timor Tengah Utara selama periode pengamatan.

Tabel 5.4
Rasio Kemandirian Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2014-2016

| Tahun Anggaran | Pendapatan Asli Daerah (Rp) | Transfer Pusat dan Provinsi | Pinjaman (Rp) | Efektivitas Kemandirian (%) | Kemampuan Keuangan |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6=2/3+4 | |
| 2014 | 70.227.478.519 | 515.647.707.537 | 16.201.288.179 | 13,20 | Rendah sekali |
| 2015 | 72.408.429.832 | 664.947.339.943 | 15.975.409.248 | 10,63 | Rendah sekali |
| 2016 | 74.823.080.565 | 734.095.022.573 | 27.218.516.438 | 9,83 | Rendah sekali |
| Rata-rata | | | | 11,22 | |

Sumber: BPKAD Kabupaten Belu

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.6 diatas, dapat dilihat bahwa kemandirian Kabupaten Timor Tengah Utara tahun anggaran 2014-2016 semakin baik. Nilai terendah terjadi pada tahun anggaran 2014, sebesar 5,28%, meningkat 0,52% menjadi 5,80% pada tahun 2015 dan 0,35% menjadi 6,15% ditahun 2016. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan persentase PAD pada tahun 2015 sebesar 12,82% dan pada tahun 2016 sebesar 32,76%.

Jika dibandingkan dengan rasio yang menjadi *benchmark* menurut Mahmudi (2016), maka rasio kemandirian keuangan daerah yang dicapai oleh Kabupaten TTU ini selama periode pengamatan memperlihatkan tingkat pencapaian yang sangat rendah karena nilai yang diperoleh setiap tahunnya masih dibawah 25% dari skala interval kemandirian keuangan daerah nasional yang menjadi *benchmark*.

Sementara itu, pertumbuhan keuangan pemerintah Kabupaten Belu menurun selama tiga tahun anggaran tersebut, yaitu 2014-2016. Dimulai pada tahun 2014 sebesar 13,20%, pada tahun 2015 menurun 2,57% menjadi 10,63% dan 0,8% menjadi 9,83% pada tahun 2016. Hal ini

disebabkan karena pemerintah belum mampu menggali sumber pendapatan asli daerah yang dimilikinya sehingga ketergantungan keuangan daerah dari Pemerintah Pusat dan Provinsi berupa dana transfer masih sangat besar. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase pendatan asli daerah yang masih sangat kecil jika dibandingkan dana transfer.

Jika dibandingkan dengan rasio yang menjadi *benchmark* menurut Mahmudi (2016), maka rasio kemandirian keuangan daerah yang dicapai oleh Kabupaten Belu ini selama periode pengamatan memperlihatkan tingkat pencapaian yang sangat rendah karena nilai yang diperoleh setiap tahunnya masih dibawah 25% dari skala interval kemandirian keuangan daerah nasional yang menjadi *benchmark*.

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, meskipun persentase kemandirian keuangan daerah Kabupaten TTU meningkat setiap tahunnya, namun kemandirian keuangannya selama periode pengamatan masih tergolong rendah sekali karena rata-rata persentasenya sebesar 5,18%. Hal itu juga terjadi pada Kabupaten Belu, dimana kemampuan keuangan daerahnya dinilai sangat rendah karena rata-rata persentasenya sebesar 11,22% sehingga memiliki pola hubungan instruktif dimana peranan Pemerintah Pusat masih lebih dominan dibandingkan Pemerintah Daerah. Meskipun rasio kemandirian keuangan kedua kabupaten ini tergolong rendah, tetapi kemandirian keuangan Kabupaten Belu lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Timor Tengah Utara.

5.1.3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi (Mahmudi, 2016). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Berikut adalah hasil perhitungan ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Timor Tengah Utara selama periode pengamatan 2014 – 2016.

a. Tahun anggaran 2014

$$\begin{aligned}\text{Rasio Ketergantungan Daerah} &= \frac{592.017.131.798}{688.661.451.560,22} \times 100\% \\ &= 85,97\%\end{aligned}$$

b. Tahun anggaran 2015

$$\begin{aligned}\text{Rasio Ketergantungan Daerah} &= \frac{616.246.049.242}{783.648.995.959,80} \times 100\% \\ &= 78,64\%\end{aligned}$$

c. Tahun anggaran 2016

$$\begin{aligned}\text{Rasio Ketergantungan Daerah} &= \frac{757.385.944.356}{918.557.400.998,73} \times 100\% \\ &= 82,45\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, berikut tabel yang memperlihatkan rekapitulasi ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Timor Tengah Utara selama periode pengamatan.

Tabel 5.5
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun Anggaran 2014-2016

| Tahun Anggaran | Pendapatan Transfer (Rp) | Total Pendapatan (Rp) | Efektivitas Ketergantungan (%) | Kemampuan Keuangan |
|----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=2/3 | |
| 2014 | 656.632.340.919 | 688.661.451.560,22 | 85,97 | Sangat tinggi |
| 2015 | 741.570.956.832 | 783.648.995.959,80 | 78,64 | Sangat tinggi |
| 2016 | 870.583.321.955 | 918.557.400.998,73 | 82,45 | Sangat tinggi |
| Rata-rata | | | 82,35 | |

Sumber: BKAD Kabupaten TTU

Sementara perhitungan ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Belu selama periode pengamatan 2014 – 2016 adalah sebagai berikut:

a. Tahun anggaran 2014

$$\begin{aligned} \text{Rasio Ketergantungan Daerah} &= \frac{515.647.707.537}{586.677.127.234} \times 100\% \\ &= 87,89\% \end{aligned}$$

b. Tahun anggaran 2015

$$\begin{aligned} \text{Rasio Ketergantungan Daerah} &= \frac{664.947.339.943}{738.626.408.498} \times 100\% \\ &= 90,02\% \end{aligned}$$

c. Tahun anggaran 2016

$$\begin{aligned} \text{Rasio Ketergantungan Daerah} &= \frac{734.095.022.573}{816.442.053.570} \times 100\% \\ &= 89,91\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, berikut tabel yang memperlihatkan rekapitulasi ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Belu selama periode pengamatan.

Tabel 5.6
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2014-2016

| Tahun Anggaran | Pendapatan Transfer (Rp) | Total Pendapatan (Rp) | Efektivitas Ketergantungan (%) | Kemampuan Keuangan |
|----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=2/3 | |
| 2014 | 515.647.707.537 | 586.677.127.234 | 87,89 | Sangat tinggi |
| 2015 | 664.947.339.943 | 738.626.408.498 | 90,02 | Sangat tinggi |
| 2016 | 734.095.022.573 | 816.442.053.570 | 89,91 | Sangat tinggi |
| Rata-rata | | | 89,28 | |

Sumber: BPKAD Kabupaten Belu

Dari hasil perhitungan pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun anggaran 2014-2016 berfluktuatif selama tiga tahun anggaran dimulai dari tahun anggaran 2014 dengan nilai 85,97%, kemudian pada tahun 2015 menurun 7,33% menjadi 78,64, kemudian naik lagi 3,81% menjadi 82,45% pada tahun 2016.

Jika dibandingkan dengan rasio yang menjadi *benchmark* menurut Mahmudi (2016), maka rasio ketergantungan keuangan daerah yang dicapai oleh Kabupaten TTU ini selama periode pengamatan memperlihatkan tingkat pencapaian sangat tinggi dari rasio ketergantungan keuangan daerah, karena nilai yang diperoleh setiap tahunnya yaitu diatas 50%, dari skala interval ketergantungan keuangan daerah nasional yang menjadi *benchmark*.

Sementara itu, rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Belu selama tiga tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2014-2016 berfluktuatif. Nilai terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 87,89% dan naik 2,13% menjadi 90,02% pada tahun 2015 sedangkan pada tahun 2016 menurun 0,11% menjadi 89,91%. Hal ini disebabkan karena, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Belu belum mampu menggali sumber pendapatan asli daerahnya, sehingga total pendapatan daerah masih didominasi oleh pendapatan dari pusat berupa pendapatan transfer.

Jika dibandingkan dengan rasio yang menjadi *benchmark* menurut Mahmudi (2016), maka rasio ketergantungan keuangan daerah yang dicapai oleh Kabupaten Belu ini selama periode pengamatan memperlihatkan tingkat pencapaian sangat tinggi dari rasio ketergantungan keuangan daerah, karena nilai yang diperoleh setiap tahunnya yaitu diatas 50%, dari skala interval ketergantungan keuangan daerah nasional yang menjadi *benchmark*.

Dengan demikian berdasarkan, uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Belu kepada Pemerintah Pusat sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata rasio ketergantungan keuangan daerah yang begitu tinggi terhadap transfer Pemerintah Pusat, yaitu masing-masing sebesar 82,35% untuk Kabupaten Timor Tengah Utara dan 89,28% untuk Kabupaten Belu. Meskipun rasio ketergantungan keuangan daerah kedua

kabupaten ini tergolong sangat tinggi, tetapi ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Belu lebih kecil dibandingkan dengan Kabupaten Timor Tengah Utara.

5.1.4. Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah (Mahmudi, 2016).

Rumus derajat desentralisasi sebagai berikut:

$$\text{Derajat desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daaerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Berikut adalah hasil perhitungan derajat desentralisasi Kabupaten Timor Tengah Utara selama periode pengamatan 2014 – 2016.

a. Tahun anggaran 2014

$$\begin{aligned}\text{Derajat Desentralisasi} &= \frac{32.029.110.641,22}{688.661.451.560,22} \times 100\% \\ &= 4,63\%\end{aligned}$$

b. Tahun anggaran 2015

$$\begin{aligned}\text{Derajat Desentralisasi} &= \frac{36.136.381.127,80}{783.648.995.959,80} \times 100\% \\ &= 4,61\%\end{aligned}$$

c. Tahun anggaran 2016

$$\begin{aligned} \text{Derajat Desentralisasi} &= \frac{47.974.079.043,73}{918.557.400.998,73} \times 100\% \\ &= 5,22\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, berikut tabel yang memperlihatkan rekapitulasi derajat desentralisasi keuangan daerah Kabupaten TTU selama periode pengamatan.

Tabel 5.7
Derajat Desentralisasi Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2014-2016

| Tahun Anggaran | Pendapatan Asli Daerah (Rp) | Total Pendapatan Daerah (Rp) | Efektivitas Derajat Desentralisasi (%) | Kemampuan Keuangan |
|----------------|-----------------------------|------------------------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=2/3 | |
| 2014 | 32.029.110.641,22 | 688.661.451.560,22 | 4,65 | Kurang baik |
| 2015 | 36.136.381.127,80 | 783.648.995.959,80 | 4,61 | Tidak baik |
| 2016 | 47.974.079.043,73 | 918.557.400.998,73 | 5,22 | Tidak baik |
| Rata-rata | | | 4,83 | |

Sumber: BKAD Kabupaten TTU

Sementara perhitungan derajat desentralisasi Kabupaten Belu selama periode pengamatan 2014 – 2016 adalah sebagai berikut:

a. Tahun anggaran 2014

$$\begin{aligned} \text{Derajat Desentralisasi} &= \frac{70.227.478.519}{586.677.127.234} \times 100\% \\ &= 11,97\% \end{aligned}$$

b. Tahun anggaran 2015

$$\begin{aligned} \text{Derajat Desentralisasi} &= \frac{72.408.429.832}{738.626.408.498} \times 100\% \\ &= 9,80\% \end{aligned}$$

c. Tahun anggaran 2016

$$\begin{aligned} \text{Derajat Desentralisasi} &= \frac{74.823.080.565}{816.442.053.570} \times 100\% \\ &= 9,16\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, berikut tabel yang memperlihatkan rekapitulasi derajat desentralisasi keuangan daerah Kabupaten Belu selama periode pengamatan.

Tabel 5.8
Derajat Desentralisasi Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2014-2016

| Tahun Anggaran | Pendapatan Asli Daerah (Rp) | Total Pendapatan Daerah (Rp) | Efektivitas Derajat Desentralisasi (%) | Kemampuan Keuangan |
|----------------|-----------------------------|------------------------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=2/3 | |
| 2014 | 70.227.478.519 | 586.677.127.234 | 11,97 | Kurang baik |
| 2015 | 72.408.429.832 | 738.626.408.498 | 9,80 | Tidak baik |
| 2016 | 74.823.080.565 | 816.442.053.570 | 9,16 | Tidak baik |
| Rata-rata | | | 10,31 | |

Sumber: BPKAD Kabupaten Belu

Dari hasil perhitungan derajat desentralisasi pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa derajat kontribusi PAD Kabupaten Timor Tengah Utara terhadap pendapatan daerah selama tiga tahun anggaran, yaitu tahun anggaran 2014-2014 berfluktuatif, yaitu ditahun 2014 sebesar 4,65% , menurun 0,04% menjadi 4,61% pada tahun 2015, sementara pada tahun 2016 meningkat 0,61% menjadi 5,22%. Hal itu disebabkan karena adanya peningkatan PAD pada tahun 2014 sebesar 78,07%, pada tahun 2015 sebesar 12,82% dan 32,76% pada tahun 2016.

Jika dibandingkan dengan rasio yang menjadi *benchmark* menurut Mahmudi (2016), maka rasio derajat desentralisasi yang dicapai oleh Kabupaten TTU ini selama periode pengamatan memperlihatkan tingkat pencapaian yang tidak baik, karena nilai yang diperoleh setiap tahunnya

masih dibawah 10% dari skala rasio derajat desentralisasi nasional yang menjadi *benchmark*.

Sedangkan rasio derajat desentralisasi Kabupaten Belu menurun selama selama tiga tahun anggaran yaitu, tahun anggaran 2014-2016. Derajat desentralisasi tertinggi terjadi ditahun 2014 sebesar 11,97%, sementara pada tahun 2015 menurun 2,17% menjadi 9,8% dan 0,64% menjadi 9,16% pada tahun 2016. Hal ini disebabkan karena menurunnya hasil retribusi daerah tahun 2015 sebesar -77,48% dan -34,56% pada tahun 2016.

Jika dibandingkan dengan rasio yang menjadi *benchmark* menurut Mahmudi (2016), maka rasio derajat desentralisasi yang dicapai oleh Kabupaten Belu ini selama periode pengamatan memperlihatkan tingkat pencapaian yang kurang baik pada tahun 2014, karena nilai yang diperoleh masih dibawah 25%, sedangkan pada tahun 2015 dan 2016, tingkat pencapaiannya tergolong tidak baik karena nilai yang diperoleh masih dibawah 10% dari skala rasio derajat desentralisasi nasional yang menjadi *benchmark*.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Belu tidak baik. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata rasio derajat desentralisasi keuangan daerah, yaitu masing-masing sebesar 4,83% untuk Kabupaten TTU dan 10,31% untuk Kabupaten Belu. Meskipun rasio derajat desentralisasi kedua kabupaten

tergolong tidak baik, tetapi kontribusi PAD Kabupaten Belu terhadap total pendapatan daerah lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Timor Tengah Utara.

5.1.5. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2016).

Rumus rasio efektivitas pendapatan asli daerah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Berikut adalah hasil perhitungan efektivitas PAD Kabupaten TTU selama periode pengamatan 2014 – 2016.

a. Tahun anggaran 2014

$$\begin{aligned} \text{Rasio efektivitas PAD} &= \frac{32.029.110.641,22}{39.328.958.956,71} \times 100\% \\ &= 81,44\% \end{aligned}$$

b. Tahun anggaran 2015

$$\begin{aligned} \text{Rasio efektivitas PAD} &= \frac{36.136.381.127,80}{38.552.198.968,50} \times 100\% \\ &= 93,73\% \end{aligned}$$

c. Tahun anggaran 2016

$$\begin{aligned} \text{Rasio efektivitas PAD} &= \frac{47.974.079.043,73}{55.402.683.733,55} \times 100\% \\ &= 86,59\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, berikut tabel yang memperlihatkan rekapitulasi efektivitas PAD Kabupaten TTU selama periode pengamatan.

Tabel 5.9
Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2014-2016

| Tahun Anggaran | Anggaran PAD (Rp) | Realisasi PAD (Rp) | Efektivitas PAD (%) | Kemampuan Keuangan |
|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | |
| 2014 | 39.328.958.956,71 | 32.029.110.641,22 | 81,44 | Cukup efektif |
| 2015 | 38.552.198.968,50 | 36.136.381.127,80 | 93,73 | Efektif |
| 2016 | 55.402.683.733,55 | 47.974.079.043,73 | 86,59 | Cukup efektif |
| Rata-rata | | | 87,25 | |

Sumber: BKAD Kabupaten TTU

Sementara perhitungan efektivitas PAD Kabupaten Belu selama periode pengamatan 2014 – 2016 adalah sebagai berikut:

a. Tahun anggaran 2014

$$\begin{aligned} \text{Rasio efektivitas PAD} &= \frac{63.892.438.331}{70.227.478.519} \times 100\% \\ &= 90,98\% \end{aligned}$$

b. Tahun anggaran 2015

$$\begin{aligned} \text{Rasio efektivitas PAD} &= \frac{64.534.729.633}{72.408.429.832} \times 100\% \\ &= 89,13\% \end{aligned}$$

c. Tahun anggaran 2016

$$\begin{aligned} \text{Rasio efektivitas PAD} &= \frac{64.906.714.769}{74.823.080.565} \times 100\% \\ &= 86,75\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, berikut tabel yang memperlihatkan rekapitulasi hasil perhitungan efektivitas PAD efektivitas PAD Kabupaten Belu selama periode pengamatan.

Tabel 5.10
Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2014-2016

| Tahun Anggaran | Anggaran PAD (Rp) | Realisasi PAD (Rp) | Efektivitas PAD (%) | Kemampuan Keuangan |
|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | |
| 2014 | 63.892.438.331 | 70.227.478.519 | 90,98 | Efektif |
| 2015 | 64.534.729.633 | 72.408.429.832 | 89,13 | Cukup efektif |
| 2016 | 64.906.714.769 | 74.823.080.565 | 86,75 | Cukup efektif |
| Rata-rata | | | 88,95 | |

Sumber: BPKAD Kabupaten Belu

Berdasarkan tabel perhitungan rasio efektivitas pendapatan asli daerah diatas, dapat diketahui bahwa efektivitas pendapatan asli daerah Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2014 dan 2016 cukup efektif, karena nilai yang diperoleh sebesar 81,44% dan ditahun 2015 meningkat 15,10% menjadi 93,73%, sementara ditahun 2016 menurun -7,62% menjadi 86,59%. Hal itu disebabkan karena menurunnya retribusi daerah sebesar -16,30% pada tahun 2015.

Jika dibandingkan dengan rasio yang menjadi *benchmark* menurut Mahmudi (2016), maka rasio efektivitas PAD yang dicapai oleh Kabupaten TTU ini selama periode tahun anggaran 2014 dan 2016 memperlihatkan tingkat pencapaian yang cukup efektif karena nilai yang diperoleh berkisar masih dibawah 90%, sedangkan pada tahun 2016 tergolong efektif karena nilai yang diperoleh masih dibawah 100% dari rasio efektivitas pendapatan asli daerah nasional yang menjadi *benchmark*.

Sementara itu rasio efektivitas pendapatan asli daerah Kabupaten Belu dari tahun 2014-2016 memiliki hasil yang menurun dengan nilai rasio yang diperoleh masing-masing 90,98% pada tahun 2014, menurun -2,03% menjadi 89,13% pada tahun 2015, dan 1,55% menjadi 86,75% pada tahun 2016. Hal itu disebabkan karena pemerintah Kabupaten Belu sudah mampu merealisasikan PAD yang dianggarkan pemerintah daerahnya.

Jika dibandingkan dengan rasio yang menjadi *benchmark* menurut Mahmudi (2016), maka rasio efektivitas PAD yang dicapai oleh Kabupaten Belu ini selama periode pengamatan memperlihatkan tingkat pencapaian yang sangat efektif karena nilai yang diperoleh sudah lebih dari 100% dari rasio efektivitas pendapatan asli daerah nasional yang menjadi *benchmark*.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas PAD Kabupaten TTU cukup efektif, sedangkan efektivitas PAD Kabupaten Belu sangat efektif. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata rasio efektivitas PAD kedua daerah tersebut, yaitu masing-masing 87,25% untuk Kabupaten TTU dan 88,95% untuk Kabupaten Belu. Dengan demikian, kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dalam merealisasikan pendapatan asli daerahnya lebih efektif dibandingkan dengan Kabupaten Timor Tengah Utara.

5.1.6. Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan

jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan, (Mahmudi:2016). Rasio efektivitas pajak daerah dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal 1 atau 100%.

$$\text{Rasio Efektivitas PD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Anggaran Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Berikut adalah hasil perhitungan efektivitas Pajak daerah Kabupaten TTU selama periode pengamatan 2014 – 2016.

a. Tahun anggaran 2014

$$\begin{aligned}\text{Rasio efektivitas PAD} &= \frac{4.901.084.171,00}{7.970.629.599,55} \times 100\% \\ &= 61,49\%\end{aligned}$$

b. Tahun anggaran 2015

$$\begin{aligned}\text{Rasio efektivitas PAD} &= \frac{5.517.054.752,67}{6.483.399.991,50} \times 100\% \\ &= 85,10\%\end{aligned}$$

c. Tahun anggaran 2016

$$\begin{aligned}\text{Rasio efektivitas PAD} &= \frac{9.382.622.550,88}{7.039.881.992,78} \times 100\% \\ &= 133,28\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, berikut tabel yang memperlihatkan rekapitulasi hasil perhitungan efektivitas pajak daerah Kabupaten TTU selama periode pengamatan.

Tabel 5.11

**Rasio Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun
Anggaran 2014-2016**

| Tahun Anggaran | Anggaran Penerimaan Pajak Daerah (Rp) | Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rp) | Efektivitas Penerimaan Pendapatan Daerah (%) |
|----------------|---------------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| 2014 | 7.970.629.599,55 | 4.901.084.171,00 | 61,49 |
| 2015 | 6.483.399.991,50 | 5.517.054.752,67 | 85,10 |
| 2016 | 7.039.881.992,78 | 9.382.622.550,88 | 133,28 |
| Rata-rata | | | 93,29 |

Sumber: BKAD Kabupaten TTU

Sementara perhitungan efektivitas Pajak daerah Kabupaten Belu selama periode pengamatan 2014 – 2016 adalah sebagai berikut:

a. Tahun anggaran 2014

$$\begin{aligned} \text{Rasio efektivitas PAD} &= \frac{10.066.654.085}{8.234.295.057} \times 100\% \\ &= 122,25\% \end{aligned}$$

b. Tahun anggaran 2015

$$\begin{aligned} \text{Rasio efektivitas PAD} &= \frac{8.382.589.753}{12.614.389.488} \times 100\% \\ &= 66,45\% \end{aligned}$$

c. Tahun anggaran 2016

$$\begin{aligned} \text{Rasio efektivitas PAD} &= \frac{11.521.948.915}{16.177.005.323} \times 100\% \\ &= 71,22\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, berikut tabel yang memperlihatkan rekapitulasi hasil perhitungan efektivitas pajak daerah Kabupaten Belu selama periode pengamatan.

Tabel 5.12
Rasio Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2014-2016

| Tahun Anggaran | Anggaran Penerimaan Pajak Daerah (Rp) | Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rp) | Efektivitas Penerimaan Pendapatan Daerah (%) |
|----------------|---------------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| 2014 | 10.066.654.085 | 8.234.295.057 | 122,25 |
| 2015 | 8.382.589.753 | 12.614.389.488 | 66,45 |
| 2016 | 11.521.948.915 | 16.177.005.323 | 71,22 |
| Rata-rata | | | 86,64 |

Sumber: BPKAD Kabupaten Belu

Berdasarkan tabel perhitungan rasio efektivitas pajak daerah diatas, dapat diketahui bahwa efektivitas pajak daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun anggaran 2014 tergolong tidak efektif karena rasio yang dicapai yaitu sebesar 61,49%, dan pada tahun 2015 masih tergolong tidak efektif karena persentasenya meningkat 23,61% menjadi 85,10% sementara itu, pada tahun 2016 tergolong efektif karena persentasenya meningkat sebesar 48,18% menjadi 133,28%.

Jika dibandingkan dengan rasio yang menjadi *benchmark* menurut Mahmudi (2016), maka rasio efektivitas pajak daerah yang dicapai oleh Kabupaten Timor Tengah Utara ini selama periode pengamatan memperlihatkan tingkat pencapaian yang tidak efektif pada tahun 2104 dan 2015, karena nilai yang diperoleh dibawah 100%, sedangkan pada tahun 2016 tergolong sangat efektif, karena nilai yang diperoleh diatas 100% dari rasio pertumbuhan nasional yang menjadi *benchmark*.

Sementara itu rasio efektivitas pajak daerah Kabupaten Belu pada tahun 2014 tergolong sangat efektif yaitu sebesar 122,25%,sedangkan pada tahun 2015 dan 2016 tergolong tidak efektif karena persentasenya

menurun 55,8% menjadi 66,45% pada tahun 2015 dan naik 4,77% menjadi 71,22% pada tahun 2016. Hal itu disebabkan karena pemerintah daerah Kabupaten Belu belum mampu menggali sumber pendapatan asli daerahnya.

Jika dibandingkan dengan rasio yang menjadi *benchmark* menurut Mahmudi (2016), maka rasio efektivitas pajak daerah yang dicapai oleh Kabupaten Belu ini selama periode pengamatan memperlihatkan tingkat pencapaian yang sangat efektif pada tahun 2014, karena nilai yang diperoleh di atas 100%, sedangkan pada tahun 2015 dan 2016 tergolong tidak efektif karena nilai yang diperoleh masih di bawah 100% dari rasio pertumbuhan nasional yang menjadi *benchmark*.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam merealisasikan pendapatan pajak daerahnya lebih efektif jika dibandingkan dengan Kabupaten Belu. Hal tersebut dapat dilihat dari rata-rata rasio efektivitas pajak daerah Kabupaten Timor Tengah Utara sebesar 93,29% dan Kabupaten Belu sebesar 86,64%.

5.1.7. Perbandingan Kinerja Keuangan Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Belu

Dari hasil perhitungan rasio-rasio di atas, maka dapat dilihat perbandingan kinerja keuangan daerah antara Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Belu sebagai berikut:

Tabel 5.13
Perbandingan kinerja keuangan Kabupaten TTU dan Kabupaten Belu
TA. 2014-2016

| No | Keterangan | Kemampuan keuangan |
|----|--|--------------------|
| 1 | Kabupaten Timor Tengah Utara | |
| | Kinerja keuangan pada Kabupaten Timor Tengah Utara masih rendah terutama dalam pengelolaan pendapatan asli daerah yang masih kecil dan realisasi yang belum mencapai target. Hal tersebut juga dapat dilihat dari ketergantungan keuangan daerah yang masih sangat tinggi terhadap dana dari pemerintah pusat dalam bentuk pendapatan transfer yang selalu mengalami peningkatan setiap tahun selama masa pengamatan. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Timor Tengah Utara belum mampu untuk mandiri dan melaksanakan desentralisasi fiskal. | Belum efektif |
| 2 | Kabupaten Belu | |
| | Kinerja keuangan Kabupaten Belu terutama dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerahnya lebih efektif dari pada Kabupaten Timor Tengah Utara, hal itu dapat dilihat dari besarnya realisasi penerimaan pendapatan asli daerah yang melebihi target yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Belu. Meskipun demikian, ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Belu terhadap dana dari pemerintah pusat dalam bentuk pendapatan transfer masih sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Belu belum mampu untuk mandiri dan melaksanakan desentralisasi fiskal. | Belum efektif |